



Konstruksi Narasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Komunikasi Purbaya: Sebuah Analisis Wacana Kritis

Roynanda Sinaga¹, Ibnu Sukoco², Maratua Hasonangan Harahap³

Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Program Doktorat Ilmu Ekonomi, Universitas Sumatera Utara

Program Magister Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 6 Januari 2026

Revised: 20 Januari 2026

Accepted: 4 Maret 2026

Keywords:

Konstruksi Narasi

Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi narasi pertumbuhan ekonomi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui lensa Analisis Wacana Kritis (AWK). Fokus utama terletak pada penggunaan istilah "noise" ekonomi, target pertumbuhan 8 persen, dan gaya komunikasi "koboi" sebagai instrumen hegemoni. Menggunakan model tiga dimensi Norman Fairclough teks, praktik diskursif, dan praktik sosial budaya analisis ini mengungkap bahwa narasi tersebut beroperasi untuk memarginalkan suara kritis dengan melabelinya sebagai gangguan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi konfrontatif ini merupakan upaya sadar membangun populisme teknokratik guna memulihkan kepercayaan publik pasca era Sri Mulyani. Disimpulkan bahwa narasi ekonomi telah bergeser menjadi optimisme agresif yang menuntut penundaan tuntutan sosial demi stabilitas nasional. Rekomendasinya, pemerintah perlu menyeimbangkan narasi optimisme dengan transparansi kebijakan yang inklusif agar kritik dari masyarakat sipil tidak hanya dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai kontrol kebijakan yang sehat.

This study aims to analyze the construction of the economic growth narrative of the Minister of Finance Purbaya Yudhi Sadewa through the lens of Critical Discourse Analysis (AWK). The main focus lies in the use of the term economic "noise", the 8 percent growth target, and the "cowboy" communication style as an instrument of hegemony. Using Norman Fairclough's three-dimensional model of texts, discursive practices, and sociocultural practices, this analysis reveals that the narrative operates to marginalize critical voices by labeling them as disorders. The results of the study show that this confrontational strategy is a conscious effort to build technocratic populism to restore public trust after the Sri Mulyani era. It is concluded that the economic narrative has shifted to aggressive optimism that demands postponement of social demands for the sake of national stability. The recommendation is that the government needs to balance the narrative of optimism with inclusive policy transparency so that criticism from civil society is not only seen as an obstacle, but also as a healthy policy control.



Corresponding Author:

Anwar Ibrahim Makarim

Department of Accounting, Universitas Indonesia

Jl. Garu I, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. 83115

Email: ymma@risetilmiah.ac.id

PENDAHULUAN

Transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa menandai titik balik signifikan dalam cara negara memproduksi dan mendistribusikan narasi ekonomi nasional. Dalam diskursus politik ekonomi, bahasa bukan sekadar medium netral untuk menyampaikan data statistik, melainkan arena di mana kekuasaan dijalankan dan realitas dikonstruksi secara selektif. Penunjukan Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), membawa gaya komunikasi baru yang dijuduli oleh publik dan media sebagai gaya "koboi" sebuah gaya yang lugas, ceplas-ceplos, dan sering kali konfrontatif terhadap narasi-narasi yang dianggap merugikan stabilitas ekonomi (Saputra, 2026).

Kehadiran narasi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diadopsi sepenuhnya oleh Purbaya, berfungsi sebagai "meta-narasi" yang mendominasi seluruh arah kebijakan fiskal. Target ini ditempatkan sebagai sebuah keharusan moral dan syarat mutlak bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*) dan menjadi negara maju. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul berbagai tantangan diskursif, mulai dari proyeksi pesimis lembaga internasional seperti Bank Dunia hingga gelombang protes masyarakat sipil yang terkristalisasi dalam gerakan "17+8 tuntutan rakyat" (Ahmadi & Rusadi, 2026).

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah bagaimana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonstruksi realitas ekonomi melalui penggunaan istilah-istilah strategis seperti "noise" ekonomi untuk membungkam skeptisisme internal maupun eksternal. Fenomena perombakan pejabat eselon I di Kementerian Keuangan dengan alasan menghilangkan "sentimen negatif" memberikan sinyal kuat bahwa narasi ekonomi saat ini tidak mentoleransi adanya disonansi dalam tubuh birokrasi. Komunikasi kebijakan yang dijalankan Purbaya tampak bertujuan untuk menciptakan ekspektasi positif yang masif di masyarakat, yang diyakini sebagai bahan bakar utama bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Selain itu, popularitas Purbaya yang meroket dalam berbagai survei publik, yang bahkan mengungguli menteri-menteri senior lainnya, memicu perdebatan mengenai kealamian dukungan tersebut. Adanya dugaan penggunaan strategi digital yang terorkestrasi atau "rekayasa organik" untuk membangun citra menteri visioner menunjukkan bahwa perang informasi telah merambah ke wilayah kebijakan fiskal yang biasanya bersifat teknokratik murni. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis kritis untuk membongkar relasi kekuasaan di balik teks-teks ekonomi tersebut, memahami bagaimana hegemoni pertumbuhan dibangun, dan melihat sejauh mana suara masyarakat sipil diakomodasi atau justru dipinggirkan dalam narasi besar kemakmuran ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) dengan model tiga dimensi yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Kerangka kerja ini dipilih karena kemampuannya untuk menghubungkan analisis linguistik mikro dengan praktik institusional dan struktur sosial makro yang melingkupinya. Dalam perspektif Fairclough, wacana dipahami sebagai praktik sosial yang tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga memproduksi dan mentransformasi realitas tersebut melalui bahasa (Prayogi, 2023).

Dimensi pertama, yaitu analisis teks (deskripsi), berfokus pada fitur-fitur linguistik dalam pernyataan resmi, siaran pers, transkrip konferensi pers, dan kutipan media dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Fitur yang dianalisis mencakup pilihan leksikal (seperti penggunaan kata "noise", "koboi", "bersih-bersih"), struktur gramatikal (penggunaan kalimat aktif untuk menegaskan agensi pemerintah), serta metafora yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi nasional. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi bagaimana representasi kekuasaan dan identitas menteri dikonstruksi melalui pilihan kata yang lugas dan berani (Marzuki, 2023).

Dimensi kedua, yaitu praktik diskursif (interpretasi), melibatkan analisis terhadap proses produksi, distribusi, dan konsumsi wacana. Hal ini mencakup bagaimana pesan-pesan dari Kementerian Keuangan diolah oleh media massa (seperti CNN Indonesia dan Tempo) serta bagaimana publik di media sosial merespons narasi tersebut. Intertekstualitas juga menjadi elemen kunci, di mana peneliti melihat

Dimensi ketiga, yaitu praktik sosial budaya (eksplanasi), mengeksplorasi konteks sosial-politik dan ekonomi yang lebih luas di Indonesia. Analisis pada level ini mencoba menjelaskan mengapa narasi pertumbuhan 8 persen menjadi dominan, bagaimana ideologi developmentalism beroperasi dalam Kabinet Merah Putih, dan bagaimana relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat sipil termanifestasi dalam penanganan isu "17+8 tuntutan rakyat". Konteks "mode bertahan" (survival mode) ekonomi akibat tekanan global menjadi latar belakang yang krusial untuk memahami urgensi dari narasi optimisme yang dibangun.

HASIL PENELITIAN

Gambar 1: Topik Utama Purbaya



Purbaya secara sistematis menggunakan metafora "noise" atau suara pengganggu untuk mengelompokkan segala bentuk informasi, opini, atau tindakan yang dianggap menciptakan sentimen negatif di pasar. Dalam pandangan Purbaya, noise ini bukan sekadar gangguan komunikasi, melainkan hambatan nyata bagi kinerja ekonomi yang harus dihilangkan. Langkah konkret dari narasi ini adalah keputusan untuk melakukan "bersih-bersih internal" di Kementerian Keuangan, termasuk pencopotan Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.

Purbaya menyatakan bahwa sentimen negatif yang muncul di mana-mana harus dihilangkan agar sistem berjalan rapi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam wacana Purbaya, keseragaman narasi dalam birokrasi adalah prasyarat bagi efektivitas kebijakan fiskal. Dengan melabeli perbedaan pandangan atau kegagalan komunikasi internal sebagai "noise", Purbaya berhasil mendelegitimasi kritik dan memperkuat otoritasnya sebagai "dirigen" utama orkestrasi ekonomi nasional. Tindakan ini juga mengirimkan pesan kepada pasar bahwa pemerintah kini memiliki kendali penuh dan tidak akan membiarkan adanya disonansi internal yang bisa dimanfaatkan oleh spekulasi (Hakim, 2025).

Tabel 1: Kerangka Strategis Narasi Ekonomi Purbaya

Istilah Strategis	Definisi Operasional dalam Wacana Purbaya	Implikasi Kebijakan
Noise	Narasi negatif, hoaks, atau disonansi internal yang merusak sentimen pasar.	Perombakan pejabat (non-job) dan sentralisasi komunikasi publik.
Debottlenecking	Upaya menghilangkan hambatan perizinan dan investasi di lapangan.	Pengaktifan Satgas P2SP untuk percepatan aduan pelaku usaha.
Survival Mode	Kondisi ekonomi yang harus bertahan di tengah tekanan nilai tukar dan global.	Efisiensi belanja non-strategis dan penguatan fundamental rupiah.
Good Start	Target pertumbuhan 8% sebagai langkah awal menuju negara maju.	Mobilisasi instrumen fiskal, moneter, dan swasta secara agresif.

Narasi Pertumbuhan 8 Persen: Antara Harapan dan Keharusan

Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo diubah oleh Purbaya dari sekadar janji kampanye menjadi sebuah "keharusan teknokratik". Purbaya membela angka ini dengan berargumen bahwa pertumbuhan 5 persen yang selama ini dianggap "aman" sebenarnya adalah sebuah kegagalan dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Ia menekankan bahwa ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih cepat agar masyarakat dapat "kaya bersama" (Kurniawan, 2025).

Dalam narasinya, Purbaya menggunakan perbandingan internasional untuk membangun rasa percaya diri nasional. Ia menyebutkan bahwa banyak negara seperti China dan Spanyol mencatatkan pertumbuhan di bawah Indonesia, sehingga masyarakat tidak perlu merasa "minder". Strategi diskursif ini bertujuan untuk mengubah skeptisisme pasar menjadi optimisme kolektif. Purbaya menegaskan bahwa jika pemerintah mampu menciptakan ekspektasi positif, maka ekonomi akan tumbuh secara positif dengan sendirinya. Target 8 persen pun diposisikan bukan sebagai angka mustahil, melainkan sebagai persyaratan objektif untuk mencapai status negara maju, yang didukung oleh kekuatan konsumsi domestik dan fenomena budaya seperti mudik sebagai pendorong ekonomi organik (Fahlevi & Sari, 2025).

Identitas "Koboi" dan Pemulihan Kepercayaan Publik

Gaya komunikasi Purbaya yang ceplas-ceplos dan blak-blakan, yang kemudian dijuluki gaya "koboi", merupakan elemen krusial dalam pembangunan citranya sebagai menteri yang transparan dan berani (Ola, 2025). Purbaya sendiri mengakui bahwa gaya ini adalah instruksi langsung dari Presiden

Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengembalikan kepercayaan publik. Dengan melakukan tindakan-tindakan simbolik seperti sidak di pelabuhan atau pasar, Purbaya berusaha menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya duduk di balik meja, tetapi aktif memberantas kebocoran dan ekspor ilegal (Silalahi & Go, 2025).

Representasi ini sangat efektif dalam membangun popularitas publik, di mana survei menunjukkan tingkat kepuasan yang mencapai 85% terhadap kinerjanya (Subagia, 2025). Namun, di balik popularitas tersebut, muncul kritik dari tokoh komunikasi seperti Hasan Nasbi yang menilai gaya "baku tikam" di depan publik dapat melemahkan soliditas pemerintah. Purbaya merespons kritik tersebut dengan menyatakan bahwa keterbukaan adalah kunci untuk memulihkan keyakinan masyarakat yang sempat terguncang oleh isu-isu defisit kas negara dan pelemahan rupiah. Ia menegaskan bahwa gaya "koboi" tersebut adalah cara paling efektif untuk menunjukkan bahwa pemerintah memegang kendali penuh atas stabilitas nasional (Estherina, 2025).

Marginalisasi Tuntutan "17+8" dalam Wacana Produktivitas

Bentrokan narasi yang paling tajam muncul ketika Purbaya dihadapkan pada gerakan "17+8 tuntutan rakyat" yang menyuarakan isu-isu keadilan sosial dan reformasi institusional. Respon awal Purbaya yang menyebut gerakan tersebut sebagai "suara sebagian kecil rakyat" menunjukkan adanya upaya diskursif untuk mengecilkan signifikansi protes tersebut. Ia berpendapat bahwa tuntutan tersebut akan hilang secara otomatis jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7 persen, karena masyarakat akan lebih sibuk mencari kerja dan "makan enak" daripada berdemonstrasi (Gunawan et al., 2026).

Meskipun Purbaya kemudian meminta maaf atas pernyataannya tersebut dan mengakui bahwa banyak masyarakat yang merasa susah saat ekonomi tertekan, esensi dari narasinya tidak berubah: bahwa pertumbuhan ekonomi adalah obat mujarab bagi seluruh persoalan sosial. Dalam pandangan Purbaya, tuntutan masyarakat sipil untuk upah layak dan pencegahan PHK massal harus diletakkan dalam kerangka produktivitas nasional. Dengan demikian, wacana Purbaya melakukan proses "depolitisasi" terhadap tuntutan hak-hak sipil, mengubahnya menjadi variabel teknis dalam mesin pertumbuhan ekonomi yang sedang diakselerasi.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap hasil penelitian mengungkapkan adanya pergeseran mendasar dalam ideologi komunikasi ekonomi di Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya bertindak sebagai pengelola keuangan negara, tetapi juga sebagai arsitek narasi yang mencoba merekonstruksi realitas ekonomi melalui pendekatan populisme teknokratik.

Hegemoni Optimisme dan Delegitimasi Kritik

Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis, penggunaan istilah "noise" oleh Purbaya dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun hegemoni optimisme. Hegemoni ini bekerja dengan cara menormalisasi pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi adalah satu-satunya jalan keselamatan bangsa, sehingga setiap suara yang meragukan atau memberikan data alternatif (seperti proyeksi Bank Dunia) dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas psikologis nasional. Dengan menghubungkan optimisme dengan patriotisme melalui ajakan agar tidak "minder" menjadi bangsa Indonesia Purbaya berhasil menciptakan tekanan sosial bagi para pengkritik agar tidak merusak momentum pertumbuhan.

Langkah drastis mencopot pejabat yang dianggap sebagai sumber "noise" juga mencerminkan praktik kekuasaan yang disipliner dalam tubuh birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas kebijakan fiskal saat ini tidak hanya dibangun di atas data yang akurat, tetapi juga di atas kesetiaan naratif terhadap visi presiden. Purbaya memosisikan dirinya sebagai pelaksana instruksi presiden yang harus memastikan bahwa seluruh instrumen negara bekerja tanpa hambatan internal. Dalam konteks ini, transparansi yang ditawarkan melalui gaya "koboi" adalah transparansi yang terarah terbuka terhadap kesalahan masa lalu atau hambatan di lapangan, namun tertutup terhadap perbedaan visi strategis mengenai arah pembangunan (Aulia et al., 2025).

Politik Representasi dalam Kasus "17+8"

Kegagalan awal Purbaya dalam merespons gerakan "17+8 tuntutan rakyat" menyingkap adanya bias kelas dalam narasi pertumbuhan yang dibangunnya. Dengan menyebut para demonstran sebagai "sebagian kecil", Purbaya melakukan proses "exclusion" (penyingkiran) terhadap realitas kelompok

masyarakat yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti buruh kontrak dan mitra ojek online. Keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis menghilangkan tuntutan sosial merupakan bentuk determinisme ekonomi yang mengabaikan dimensi hak asasi manusia dan keadilan institusional yang juga menjadi inti dari tuntutan tersebut (Trsifian, 2025).

Meskipun permintaan maaf kemudian dilayangkan sebagai langkah mitigasi konflik, hal ini lebih terlihat sebagai strategi untuk menjaga "citra menteri favorit" daripada sebuah perubahan paradigma dalam mendengarkan aspirasi bawah. Purbaya tetap menekankan bahwa solusinya adalah "memulihkan ekonomi agar lapangan kerja banyak", sebuah narasi yang menempatkan rakyat sebagai objek penerima manfaat pertumbuhan (trickle-down effect) daripada sebagai subjek aktif dalam penentuan kebijakan. Di sini, wacana berfungsi untuk meminimalkan potensi gangguan terhadap agenda besar investasi dan pendalaman pasar modal yang menjadi fokus utamanya.

Populisme Teknokratik dan Citra Digital

Popularitas Purbaya yang sangat tinggi dalam survei kepuasan publik menunjukkan keberhasilan strategi populisme teknokratik. Ia mampu mengemas kebijakan yang rumit menjadi narasi yang sederhana dan menggugah, seperti ajakan "kaya bersama" kepada generasi muda. Namun, temuan mengenai adanya "rekayasa organik" dan pola komunikasi yang terlalu rapi di media sosial menimbulkan pertanyaan tentang otentisitas dari dukungan tersebut. Dalam era perang asimetris informasi, pembentukan figur "menteri idola" bisa jadi merupakan bagian dari manajemen isu untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah struktural seperti beban utang yang mencapai Rp9.138 triliun atau defisit anggaran yang mendekati batas aman (Ronni Haga & Sunaryo Neneng, 2025).

Media massa juga memainkan peran penting dalam memperkuat konstruksi ini. Framing CNN Indonesia yang menonjolkan rasionalitas teknokratik Purbaya membantu melegitimasi kebijakannya sebagai sesuatu yang ilmiah dan objektif, sehingga sulit untuk digugat secara politik. Sebaliknya, riak-riak keberatan dari kementerian lain (seperti penolakan Menlu terhadap ide pajak Selat Malaka) menunjukkan bahwa gaya komunikasi "koboi" Purbaya terkadang melampaui batas-batas koordinasi kabinet, menciptakan potensi ketidak-solidan yang justru dapat menjadi "noise" baru bagi pasar global (Aswad et al., 2025).

Perubahan Paradigma: Dari Manajemen Risiko ke Manajemen Ekspektasi

Secara keseluruhan, narasi Purbaya menandai pergeseran dari paradigma "manajemen risiko" yang dianut oleh Sri Mulyani ke paradigma "manajemen ekspektasi". Jika Sri Mulyani dikenal karena kehati-hatiannya dalam menjaga defisit dan rasio utang demi stabilitas jangka panjang, Purbaya lebih fokus pada bagaimana membangun persepsi bahwa Indonesia adalah kekuatan ekonomi yang sedang melesat. Ia percaya bahwa ekonomi adalah permainan psikologi; jika orang percaya mereka akan kaya, mereka akan membelanjakan uangnya, dan ekonomi benar-benar akan tumbuh.

Namun, risiko dari paradigma ini adalah munculnya "expectations gap" jika realitas ekonomi tidak mampu mengejar narasi yang telah dibangun. Janji pertumbuhan 8 persen dan penurunan utang secara drastis adalah standar tinggi yang ditetapkan oleh Purbaya sendiri. Tanpa reformasi struktural yang nyata dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat kelas bawah, narasi optimisme ini berisiko pecah menjadi kekecewaan publik yang masif. Analisis wacana kritis ini menegaskan bahwa bahasa Purbaya adalah sebuah pertarungan besar: sebuah upaya untuk menggerakkan bangsa melalui kekuatan kata-kata dan optimisme, sembari mencoba menjinakkan realitas ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

PENUTUP

Analisis Wacana Kritis terhadap komunikasi ekonomi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa narasi pertumbuhan ekonomi yang dikonstruksi saat ini bukan sekadar presentasi data, melainkan instrumen kekuasaan strategis dalam transisi pemerintahan Indonesia. Purbaya berhasil membangun identitas "populisme teknokratik" melalui gaya komunikasi "koboi" yang lugas, yang secara efektif memulihkan kepercayaan publik namun juga menciptakan polarisasi diskursif. Penggunaan istilah "noise" berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan untuk menghilangkan disonansi kebijakan, sementara target pertumbuhan 8 persen diposisikan sebagai sebuah keharusan moral yang menuntut persatuan nasional.

Ditemukan bahwa terdapat ketegangan yang signifikan antara narasi pertumbuhan agregat yang diusung pemerintah dengan tuntutan keadilan distributif yang disuarakan melalui gerakan "17+8". Marginalisasi suara masyarakat sipil sebagai "suara sebagian kecil" menunjukkan bahwa ideologi developmentalism masih mendominasi cara pandang fiskal saat ini, di mana pencapaian angka makro sering kali mengesampingkan aspirasi reformasi institusional. Selain itu, popularitas Purbaya yang tinggi, meskipun efektif dalam menjaga stabilitas persepsi, menghadapi tantangan terkait otentisitas dukungan di ruang digital dan potensi instabilitas akibat gaya komunikasi yang mengabaikan koordinasi lintas sektoral.

Simpulan akhir penelitian ini menegaskan bahwa konstruksi narasi Purbaya adalah upaya untuk mengganti paradigma kehati-hatian fiskal dengan optimisme akselerasi. Keberhasilan narasi ini akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mentransformasi ekspektasi menjadi realitas ekonomi yang inklusif. Pemerintah disarankan untuk lebih membuka ruang dialog bagi "signal" kritik dari masyarakat sipil daripada melabelinya sebagai "noise", guna memastikan bahwa target pertumbuhan 8 persen tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

REFERENSI

- Ahmadi, M. D., & Rusadi, U. (2026). Ekonomi Politik Media Digital di Indonesia: "Analisis Citra Presiden Prabowo dan Kebijakan Fiskal Menteri Purbaya." *Jurnal Penelitian Inovatif*, 6(1), 187–196.
- Ahmadi, M. D., & Seran, A. (2026). Analisis Semiotika Ferdinand de Saussure: Gaya Komunikasi Koboï Menteri Keuangan Purbaya di Era Presiden Prabowo. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 6(1), 69–78.
- Aswad, M., Mau, M., & Ismail, A. (2025). Analisis Framing CNN Indonesia terhadap Figur Purbaya: Representasi Teknopolitik dalam Pemberitaan Ekonomi Nasional (10 September–6 November 2025). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Aulia, S., Amanda Syahputri, A., Ahleyani, M., Kunci, K., Purbaya, E., Perbankan, S., & Kelola Ekonomi, T. (2025). The Purbaya Effect, Banking Stock Rebound, and Implications for Public Policy in the National Economy. In *Kalamizu : Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama* (Vol. 1).
- Estherina. (2025). *Tanggapan Purbaya soal Gaya Komunikasinya yang Dikritik Hasan Nasbi*. Tempo.
- Fahlevi, Y. R., & Sari, D. M. (2025). Critical Analysis of Purbaya Yudhi Sadewa's Expansionary Fiscal Policy Risks and Governance. *Journal of State Public Policy*, 1(1), 25–37.
- Gunawan, B. T., Manupassa, M. R., & Astini, P. A. (2026). MEMBANGUN INOVATOR MUDA DI ERA SOCIETY 5.0: LITERASI DIGITAL DAN KECERDASAN EMOSIONAL GEN Z DALAM MENYIKAPI HOAKS POLITIK. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 6.
- Hakim, R. L. (2025). Critical Reflection on Public Arguments: Purbaya Yudhi Sadewa. *No. This Paper Has Not Appeared, nor Has It Been Accepted to Appear, in Any Paper Series, Journal, or Book*.
- Kurniawan, D. (2025). *Purbaya Yudhi Sadewa: Bagaimana Menkeu Baru Mengubah Arah Anggaran Negara*. Afdan Rojabi Publisher.
- Marzuki, I. (2023). Analisis Wacana Kritis (Teori dan Praktik). *Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. UNIMUDAPress*.
- Ola, B. K. G. (2025). Menilik Gaya Koboï ala Purbaya. <https://ilkom.fikom.unpad.ac.id/Menilik-Gaya-Koboï-Ala-Purbaya/>.
- Prayogi, R. (2023). *Media, Wacana Korupsi, dan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*. Selat Media.
- Ronni Haga, & Sunaryo Neneng. (2025). Analisis Fenomena "Purbaya Effect": Transformasi Psikologi Pasar dan Implikasi Kebijakan Fiskal Agresif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(4). <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i4.1908>
- Saputra, A. (2026). Analisis Retorika Pada Pidato Pertama Purbaya Yudhi Sadewa Sebagai Menteri Keuangan. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, 9(1), 40–58.
- Silalahi, W., & Go, W. (2025). RESET KEUANGAN NEGARA ALA COWBOY ANALISA YURIDIS RESTRUKTURISASI FISKAL DAN WACANA REDENOMINASI RUPIAH. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(2), 211–232.
- Subagia. (2025). *Purbaya Sang Menteri Terbaik Prabowo; Ini Beneran atau Kerja Buzzer?* Indosiana by Tempo.
- Trsifian, D. (2025). *UGM Expert Urges Public Officials to Improve Communication Style Amid Controversial Remarks*. Universitas Gadjah Mada.